



KOMDIGI



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SERANG



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jl. Veteran No. 1 Serang – Provinsi Banten  
Telp. (0254) 200953-200737-200252, Fax. (0254) 201952  
e-mail: diskominfosatik@serangkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN SERANG**

NOMOR : 700/008-Diskominfo/Sekret/2025

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN SERANG**  
**TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SERANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 108 ayat satu (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - Bahwa untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026, yang terdiri dari unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Instansi yang menangani Perencanaan Daerah;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kab. Serang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026.

Mengingat...

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 - 2026;
  - Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  - Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah...

- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029;
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
- Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati No. 95 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Serang Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan dan Kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026, terdiri dari:
- Tim Sekretariat
  - Kelompok Kerja
- KETIGA : Ketua Tim Sekretariat dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026, mempunyai tugas:
- Memberikan pengarah dan masukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026, agar penyusunan mengacu kepada visi dan misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2026;
  - Mempersiapkan dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - Mengkoordinir tugas Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026;
  - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Indikator Kinerja program dan kegiatan yang tertuang didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 ini mempunyai tugas:
- Mengkoordinir Pembentukan tim penyusun Renja Diskominfo dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026;

Mempersiapkan...

2. Mempersiapkan keperluan administrasi, bahan/materi rapat, koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026;
3. Menyusun agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan nota dinas penyusunan Renja hingga verifikasi rancangan Renja Diskominfo.
- KELIMA** : Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Keputusan ini mempunyai Tugas:
- Melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026;
  - Mengumpulkan/menghimpun data dan menyusun serta mensinkronkan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan RKPD 2026;
  - Menilai dan menganalisa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
  - Koordinator Kelompok Kerja melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah sesuai dengan bidang tugas didalam Tim I, II, dan Tim III;
  - Mengkoordinir penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data, mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja Diskominfo;
  - Mengkoordinir penyusunan dan perumusan rancangan Renja Diskominfo yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah mencakup:
    - Regulasi yang menjadi asas legal bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian Perangkat Daerah;

2. Renja Perangkat...

- Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan Perangkat Daerah dan perkiraan tingkat capaian target Renja Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan;
  - Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
  - Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan Perangkat Daerah dan Informasi lain yang terkait pelayanan Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas:
- Menyiapkan dokumen Renja di Bidangny;
  - Menguasai substansi fungsi dan tugas Bidangny;
  - Anggota Kelompok Kerja yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SERANG**

**Dr. H. Herofatna, S.Kom., M.Si**  
NIP. 19900620 200604 1 016

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
**NOMOR** : 700/008-Diskominfo/Statistik/Sekret/2025  
**TANGGAL** : 6 Januari 2025

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Pengarah
2	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi	Sekretaris Tim
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Esti Pitrawasti, A.Md	Anggota
6	Asep Maulana Syakir, S.Kom	Anggota
7	Siskawati	Anggota

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SERANG**

**Dr. H. Herofatna, S.Kom., M.Si**  
NIP. 19900620 200604 1 016

**LAMPIRAN II** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
**NOMOR** : 700/008-Diskominfo/Statistik/Sekret/2025  
**TANGGAL** : 6 Januari 2025

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2026**

**1. KELOMPOK KERJA I BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Komunikasi Informasi Publik	Koordinator Kelompok Kerja
2	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
3	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
4	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 yang terkait dengan Bidang Komunikasi Informasi Publik.

**2. KELOMPOK KERJA II BIDANG APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Aplikasi dan Teknologi Informatika	Koordinator Kelompok Kerja
2	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 yang terkait dengan Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika.

**3. KELOMPOK KERJA III BIDANG PERSANDIAN DAN DATA STATISTIK**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Persandian dan Data Statistik	Koordinator Kelompok Kerja
2	Statistisi Ahli Muda	Anggota
3	Pramata Komputer Ahli Muda	Anggota
4	Manggala Informatika Ahli Muda	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 yang terkait dengan Bidang Persandian dan Data Statistik.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SERANG**

  
**Dr. H. Haerofiatra, S.Kom., M.Si**  
NIP. 19800620 200604 1 016

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kabupaten Serang Tahun 2026.

Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Serang Tahun 2026 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Serang Tahun 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang.

Serang, 22 September 2025  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
dan Persandian Kab. Serang



Dr. H. Haerofiatna, S.Kom., M.Si  
NIP. 19800620 200604 1 016

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang .....	26
2.4. Reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Diskominfo Kabupaten Serang .....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
Bab III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH .....	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	36
3.3. Program dan Kegiatan .....	37
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	52
Bab V PENUTUP .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. .... Tahun .... Tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, Surat Edaran Bupati Serang Nomor 000.7.2/3/BAPPERIDA/2025 Tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kabupaten Serang Tahun 2026, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025.

Bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025 terkait kewenangan urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya melaksanakan analisis gambaran pelayanan, mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Renja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Banten.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 mengacu pada RKPD Kabupaten Serang Tahun 2026 dan merupakan penjabaran dari Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Serang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang berperan dalam mendukung Misi ke 5 Bupati Serang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Handal dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Prima.

Renja PD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan itu, maka Renja PD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 000.7.2/3/BAPPERIDA/2025 Tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kabupaten Serang Tahun 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
3. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa satu tahun mendatang; dan
4. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang antar bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam pengelolaan teknologi informatika;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan teknologi informasi; dan
4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **Bab I PENDAHULUAN**

Menyajikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024**

Menyajikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

Menyajikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan.

### **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menyajikan tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.

### **Bab V PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN SERANG TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dilaksanakan.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang baru terbentuk pada tahun 2019 dan merupakan pemisahan dari Bagian Komunikasi dan Informatika pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan/sub kegiatan maupun realisasi. Pada tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Serang melaksanakan 9 program, 36 kegiatan. Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Serang melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Serang melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Serang melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Dan pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Serang melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Adapun Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,**  
dengan Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Penyediaan Bahan / Material
  - h. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Kegiatan:**

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - c. Pelayanan Informasi Publik

- d. Layanan Hubungan Media
- e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

**3. Program Aplikasi Informatika, dengan Kegiatan:**

- 1) Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
  - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
  - c. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

**4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan Kegiatan:**

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
  - b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah daerah dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang Terintegrasi
  - c. Membangun Metadata Statistik Sektoral
  - d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

**5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan Kegiatan:**

- 1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel 2.1 :

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**

**Kabupaten Serang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/6) \times 100\%$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = (10/4) \times 100\%$		
2	16											
2	16	1										
2	16	1	2.01									
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.02									
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	30	30	90	3

2	16	1	2.03		<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>									
2	16	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.06		<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>									
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	1	1	1	-	1	1	0,05

2	16	1	2.08		<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>									
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	-	12	-	-
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	1	2.09		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	1	1	1	1	1	3	0,25
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77	1	1	1	1	1	3	0,038961039
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	3	3
2	16	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>									
2	16	2	2.01		<b>PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									

2	16	2	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12	-	-	-		18		
2	16	2	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	300	-	-	-		355		
2	16	2	2.01	16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	-	-	-		12		
2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	18	-	-	-		18		
2	16	2	2.01	18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100	-	-	-		100		
2	16	2	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	-	-	-		1		
2	16	2	2.01	20	Diseminasi Informasi	Presentase khalayak yang terpapar informasi publik	100	-	-	-		100		

2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4	-	-	-	4		
2	16	2	2.01	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	2	-	-	-	2		
2	16	2	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	6	-	-	-	1220		
2	16	2	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	5	-	-	-	9		
2	16	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>								
2	16	3	2.01		<b>PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								
2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa	1	-	-	-	1		
2	16	3	2.02		<b>PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								
2	16	3	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di pusat data nasional	1	-	-	-	20		
2	16	3	2.02	14	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	-	-	-	-	1		

2	16	3	2.02	16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	-	-	-	-		1		
2	16	3	2.02	18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang Diusulkan	-	-	-	-		2		
2	16	3	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	-	-	-	-		1		
2	16	3	2.02	21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	-	-	-	-		20		
2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	58	-	-	-		1		
2	16	3	2.02	25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintahan dan/ atau portal data nasional	15	-	-	-		15		
2	16	3	2.02	26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo	1	-	-	-		1		

2	16	3	2.02	28	Koordinasi dan fasilitasi, promosi, literasi, SPBE dan/ atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-	-	-	-		1		
2	16	3	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas	-	-	-	-		1		
2	16	3	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2	-	-	-		-		
2	16	3	2.02	33	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	0	-	-	-		-		
2	16	3	2.02	34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	-	-	-		-		
2	16	3	2.02	35	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1	-	-	-		-		
2	16	3	2.02	36	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	58	-	-	-		-		

2	16	3	2.02	37	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	-	-	-	-	-	-	-
2	20				<b>STATISTIK</b>									
2	20	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>									
2	20	2	2.01		<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
2	20	2	2.01	7	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	-	-	-	-	29		
2	20	2	2.01	8	Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	-	-	-	-	-	95		
2	20	2	2.01	9	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Presentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu	-	-	-	-	-	95		
2	20	2	2.01	17	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	95	-	-	-	-	-		



2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	-	-	-	29		
2	21	2	2.01	5	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	-	-	-	-		
2	21	2	2.01	6	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1	-	-	-	-		
2	21	2	2.01	7	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	29	-	-	-	-		
2	21	2	2.01	8	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	1	-	-	-	-		
2	21	2	2.02		<b>PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	-	58	-	-	58		

2	21	2	2.02	2	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	12	-	-	-		-		
											19,00		148	48,34

Tabel 2.1.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskominfo**  
**Kabupaten Serang**

NO	IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)			70%	75%	80%	85%	93%	98,37%	94,60%	85%	90%	
3	Indeks Kematangan Penerapan SPBE			2,98	2,98	2,99	3,00	2,64	3,23	3,73	3,00	3,01	
4	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)			120	140	160	170	184	240	397	170	175	
5	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan			60%	70%	80%	90%	60%	70%	80%	90%	100%	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			B	B	B	B	C	B	B	B	B	
7			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</li> <li>• Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</li> </ul>					96,67%	100%	100%	100%	100%	
								96,67%	100%	100%	100%	100%	

			• Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah					Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
8			• Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015					100%	100%	100%	100%	100%	
			• Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar					100%	100%	100%	100%	100%	
			• Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan					320%	122,41%	122,41%	100%	100%	
			• Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik					100%	100%	100%	100%	100%	
			• Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik					42,8%	71,42%	100%	100%	100%	
			• Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					100%	100%	25%	100%	100%	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</li> </ul>					100%	100%	100%	100%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</li> </ul>					26,67%	13,79%	13,79%	100%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah</li> </ul>					26,67%	13,79%	13,79%	100%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)</li> </ul>					96,67%	50%	50%	100%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase data yang dapat berbagi pakai</li> </ul>					100%	100%	100%	100%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</li> </ul>					96,67%	100%	100%	100%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</li> </ul>					10,34%	100%	100%	100%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government</li> </ul>					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
9			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi</li> </ul>					100%	100%	100%	100%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</li> </ul>					100%	100%	100%	100%	100%	

			• Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan					100%	100%	100%	100%	100%	
10			• Tersedianya buku profil daerah					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			• Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan					Tidak ada	Ada	Ada	100%	100%	
			• Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan					Tidak ada	Ada	Ada	100%	100%	
			• Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS					Tidak ada	Tidak ada	Ada	100%	100%	
			• Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS					Tidak ada	Tidak ada	Ada	100%	100%	
			• Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral					Tidak ada	Tidak ada	100%	100%	100%	
			• Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral					Tidak ada	Tidak ada	14,28%	100%	100%	
11			• Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan					100%	Tidak ada	100%	100%	100%	
			• Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah					84%	100%	13,33%	100%	100%	
			• Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah					20%	100%	13,33%	100%	100%	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan</li> </ul>					16,67%	Tidak ada	100%	100%	100%	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----------	------	------	------	--

Tabel 2.2.

Dari tabel di atas tergambar bahwa capaian kinerja dari semua target indikator kinerja utama (IKU) Diskominfo Kabupaten Serang hingga tahun 2024 bisa tercapai.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang**

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negative bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan disemua bidang.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Serang Smart City melalui strategi pelayanan berbasis Information Communication Technology (ICT) yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan, sebagai leading sector dilaksanakan oleh urusan Komunikasi dan Informatika serta didukung oleh semua urusan pemerintahan lainnya;
2. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Daerah;
4. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
5. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
6. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Simplifikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat sehingga muncul kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang yang melaksanakan tugas dalam bidang e-Government atau SPBE, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Serang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, Lembaga Kemasyarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

5. Meningkatnya efektivitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

### *Visi dan Misi Kabupaten Serang*

#### **A. VISI**

**Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029** yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA”**

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 yaitu: **”Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis”**. Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, **visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029** merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk mendukung pencapaian **visi pembangunan Provinsi Banten** dan **visi pembangunan nasional**.

Adapun makna yang terkandung dalam Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bahagia menjadi tujuan dan target utama dari visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa Kebahagiaan yang didefinisikan sebagai Perwujudan hasil pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi masyarakat berkualitas, sejahtera dengan lingkungan yang nyaman baik secara fisik, sosial, maupun emosional yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan rasa keadilan. Kabupaten Serang adalah suatu wilayah dengan penduduk yang beragam baik dilihat dari segi etnik, ras, agama, budaya, profesi maupun latar belakang pendidikan. Karena itu, Kabupaten Serang harus dirancang sebagai Kabupaten yang inklusif dan menjamin kemajemukan latar belakang tersebut, sehingga akan melahirkan kebahagiaan bagi seluruh warganya.

## B. MISI

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 maka **misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima.
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan peran serta tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang. Tindakan nyata tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas komunikasi dan informatika melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Mewujudkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan dan upaya pengentasan kemiskinan.
3. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi yang terintegrasi dalam satu sistem dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja aparatur, menciptakan efisiensi anggaran yang dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan;
4. Mengelola seluruh sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga menciptakan kesatuan sistem yang benar-benar terintegrasi seluruh fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat

meningkatkan efektivitas kinerja aparatur yang tentunya dalam upaya mewujudkan kemudahan layanan publik sebagai wujud terselenggaranya e-Government.

### ***Tantangan dan Peluang***

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah serta menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan layanan publik.

#### **Tantangan:**

1. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan security system;
2. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Serang;
3. Belum tersedianya pusat data (data center) daerah yang tentunya mengakibatkan terciptanya pulau-pulau informasi dengan data yang berbeda antara satu instansi dengan yang lainnya;
4. Kurangnya komitmen para aparatur untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Minimnya sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### **Peluang :**

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan disemua bidang;

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik;
3. Reformasi birokrasi dengan e-Government mendukung terciptanya Good Government and Clean Governance;
4. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas efektivitas dan asas efisiensi serta menciptakan transparansi bagi publik;
5. Meningkatnya jumlah penetrasi komputer di seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Serang dengan penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dengan adanya tantangan dan peluang, program-program nasional/ internasional serta mendukung Visi Kabupaten Serang, beberapa langkah atau strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Mengembangkan situs web yang berisi informasi yang diperlukan publik, baik yang bersifat statis maupun dinamis;
2. Menampilkan informasi APBD, pengadaan barang/jasa di situs web Pemerintah Kabupaten Serang;
3. Semakin mengintensifkan penggunaan TI dalam operasional aparatur menuju paperless office;
4. Semakin memantapkan e-Government;
5. Mengajukan rancangan produk hukum ketatalaksanaan e-Government di Pemerintah Kabupaten Serang;
6. Melaksanakan sosialisasi blue-print atau master-plan e-Government/ SPBE;
7. Mengajukan anggaran untuk peremajaan mainframe server;
8. Mengajukan anggaran untuk biaya maintenance infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak;
9. Revitalisasi pusat data (data center);
10. Mengintensifkan penggunaan workshop untuk in-house training;
11. Turut serta dalam mewujudkan responsive gender;
12. Membuat inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## 2.4. Review Terhadap RKPD Diskominfo Kabupaten Serang

Berikut adalah hasil review atau telaahan terhadap Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serang.

Tabel 2.3.  
Review Terhadap RKPD Tahun 2026  
Diskominfo Kabupaten Serang

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Serang	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	8.208.630.624	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Serang	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	9.402.313.624	Hasil Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar 1.193.683 untuk Belanja Modal Kebutuhan Kantor yakni DED Ruang Rapat Bawah Tenaga Outsourcing Administrasi, Belanja Makan dan Minum.
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Serang	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	100%	3.550.000.000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Serang	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	100%	10.011.210.000	Hasil Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar 6.461.210.000 untuk Belanja Vidiotron sebanyak 3 Unit, Bimtek PPID dan SP4N Lapor, Narasumber dan Makan Minum
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Serang	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	2.550.000.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Serang	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	6.659.220.004	Hasil Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar 4.109.220.004 untuk Belanja Internet Kecamatan selama 1 Tahun, DED Data Center, DED Command Center, Belanja Modal untuk Zoom, Makan Minum Rapat
			Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan	90%			Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan	90%			

						Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah				
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Kab. Serang	Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral Di lingkup Daerah	70%	<b>54.875.500</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Kab. Serang	Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral Di lingkup Daerah	70%	<b>589.125.500</b>	Hail Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar 534.250.000 untuk Belanja Jasa Konsultasi Penyediaan Data Center, Stanrdar Data dan Jasa Konsultasi OPD dan Desa Statistik
2	21	03			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Kab. Serang	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	68%	<b>322.176.604</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Kab. Serang	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	68%	<b>611.676.604</b>	Hasil Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar 289.500.000 untuk Bimtek Tim TTIS
<b>TOTAL</b>									<b>14.685.682.728</b>					<b>27.273.545.732</b>	

Tabel 2.3.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat**

Dari usulan hasil kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan melalui tahapan awal Musrenbang Desa kemudian naik ke Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten, pada tahun 2026 Diskominfo Kabupaten Serang tidak menerima Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN SERANG**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang mengacu kepada kebijakan nasional membangun sektor telekomunikasi dan tata kelola internet sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan diharapkan dapat dijadikan acuan secara konsisten sehingga sasaran pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika masalah sosial dan budaya tetap diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan ekonomi digital dengan mengoptimasikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kondisi lokal, dan penggunaan teknologi yang sudah dibangun. Dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

Terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang berupaya memasukkan dalam program/kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang telah merumuskan strategi pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet;

2. Meningkatkan pemberian informasi pada masyarakat dengan Pemerintah secara transparan dan efisien;
3. Menyediakan sistem informasi berbasis elektronik agar tercipta proses kerja yang transparan, efisien dan mudah diakses;
4. Mengoptimalkan sumber daya Telematika untuk peningkatan kelompok informasi masyarakat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja**

Isu-isu strategis Diskominfo Kabupaten Serang, antara lain;

1. Terwujudnya Kabupaten Serang Smart City melalui strategi pelayanan berbasis Information Communication Technology (ICT) yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan, sebagai leading sector dilaksanakan oleh urusan Komunikasi dan Informatika serta didukung oleh semua urusan pemerintahan lainnya;
2. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Daerah;
4. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
5. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
6. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selanjutnya sebagai penjabaran dan implementasi atas pernyataan misi 5 RPJMD, perlu dirumuskan tujuan sebagai sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang seperti tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital.
2. Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan Dapat diandalkan.
3. Meningkatkan keamanan informasi.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Serang, sesuai analisa kebutuhan untuk tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian Tabel 3.1. berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2027**  
**Diskominfo Kabupaten Serang**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
2	16				<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
2	16	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Kab. Serang	100%	<b>8.208.630.624</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	<b>9.850.356.749</b>
2	16	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 Dokumen	<b>38.206.800</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	<b>45.848.160</b>
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	5 Dokumen	30.406.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	36.488.160
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 Laporan	7.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	9.360.000
2	16	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Serang	30 Orang/ Bulan	<b>5.496.475.500</b>	Dana Transfer Umum - Dana		30 Orang/ Bulan	<b>6.595.770.600</b>

										Alokasi Umum			
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang	30 Orang/ Bulan	5.496.475.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30 Orang/ Bulan	6.595.770.600
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Serang	100%	<b>266.765.952</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	<b>320.119.142</b>
2	16	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Serang	12 Dokumen	266.765.952	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	320.119.142
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Serang	100%	<b>609.478.668</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	<b>731.374.402</b>
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	19.021.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	22.825.440
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	0 Paket	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	14.008.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	16.810.200

2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	24.004.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.804.800
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	21.058.168	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	25.269.802
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	Kab. Serang	1 Dokumen	15.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	18.360.000
2	16	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	55.555.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	66.666.000
2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	1 Laporan	44.031.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	52.838.160
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	1 Laporan	416.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	499.800.000
2	16	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Serang	100%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	0

2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Serang	0 Unit	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Unit	0
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Serang	100%	<b>1.428.834.704</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100%	<b>1.714.601.645</b>
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Serang	12 Laporan	168.515.712	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	202.218.854
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Serang	12 Laporan	527.784.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	633.340.800
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	12 Laporan	732.534.992	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	879.041.990
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Serang	100%	<b>368.869.000</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100%	<b>442.642.800</b>

2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Serang	11 Unit	230.720.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Unit	276.864.000
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serang	72 Unit	113.463.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		77 Unit	136.155.600
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Serang	1 Unit	24.686.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Unit	29.623.200
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>2</b>	<b>16</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
2	16	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	Kab. Serang	100%	<b>3.550.000.000</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	<b>4.260.000.000</b>
2	16	2	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	<b>3.550.000.000</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	<b>4.260.000.000</b>

2	16	2	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Serang	0 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Laporan	0
2	16	2	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Serang	300 komunitas	14.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	355 komunitas	17.280.000
2	16	2	2.01	16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kab. Serang	1 Laporan	25.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	30.240.000
2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Serang	18 Permohonan	79.510.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Permohonan	95.412.000

2	16	2	2.01	18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Kab. Serang	0%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100%	0
2	16	2	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab. Serang	1 Rekomendasi	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Rekomendasi	180.000.000
2	16	2	2.01	20	Diseminasi Informasi	Presentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Serang	0%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100%	0
2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Serang	4 Media	1.901.716.316	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Media	2.282.059.579
2	16	2	2.01	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Kab. Serang	2 Dokumen	795.160.332	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	954.192.398

2	16	2	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Serang	6 Konten	584.013.352	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1220 Konten	700.816.022	
2	16	2	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Serang	0 Orang	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Orang	0	
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>2</b>	<b>16</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Serang	100%	<b>2.550.000.000</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100%	<b>3.060.000.000</b>	
						Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah		90%			90%		
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	<b>3.500.000</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100%	<b>4.200.000</b>	
2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa	Kab. Serang	1 Dokumen	3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4.200.000	

2	16	3	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	<b>2.546.500.000</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	<b>3.055.800.000</b>
2	16	3	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di pusat data nasional	Kab. Serang	0 Aplikasi	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 Aplikasi	0
2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Kab. Serang	58 Perangkat Daerah	56.623.152	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Perangkat Daerah	67.947.782
2	16	3	2.02	25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintahan dan/ atau portal data nasional	Kab. Serang	1 Layanan	60.070.444	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 Layanan	72.084.533
2	16	3	2.02	26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo	Kab. Serang	0 Dokumen	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0

2	16	3	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kab. Serang	2 Aplikasi	425.806.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Aplikasi	510.967.680
2	16	3	2.02	33	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Kab. Serang	0 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0
2	16	3	2.02	34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Serang	0 Aplikasi	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Aplikasi	0
2	16	3	2.02	35	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Serang	0 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0
2	16	3	2.02	36	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Serang	58 Perangkat Daerah	2.000.000.004	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		58 Perangkat Daerah	2.400.000.005

2	16	3	2.02	37	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Serang	0 Dokumen	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0
2	16	3	2.02	38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Serang	1 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.800.000
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>2</b>	<b>20</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral Di lingkup Daerah	Kab. Serang	70%	<b>54.875.500</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	70%	<b>65.850.600</b>
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	<b>54.875.500</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100%	<b>65.850.600</b>
2	20	2	2.01	17	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kab. Serang	95%	761.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	95%	913.800

2	20	2	2.01	18	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kab. Serang	5%	18.003.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5%	21.603.600
2	20	2	2.01	19	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kab. Serang	0%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95%	0
2	20	2	2.01	20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Serang	29 Orang	36.111.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		29 Orang	43.333.200
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								
2	21	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Kab. Serang	68%	322.176.604	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		68%	386.611.925
2	21	2	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	322.176.604	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	386.611.925

2	21	2	2.01	5	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Serang	1 Laporan	119.091.904	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	142.910.285
2	21	2	2.01	6	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab. Serang	1 Laporan	29.751.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	35.701.800
2	21	2	2.01	7	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Serang	29 Perangkat Daerah	46.773.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		29 Perangkat Daerah	56.127.840
2	21	2	2.01	8	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam	Kab. Serang	1 Dokumen	126.560.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	151.872.000

						menjalankan penyelenggaraan persandian.							
2	21	2	2.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	0
2	21	2	2.02	2	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kab. Serang	0 Kegiatan	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Kegiatan	0
<b>TOTAL</b>									<b>14.685.682.728</b>				<b>17.622.819.274</b>

Tabel 3.1.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang sesuai Tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan rencana kerja dan pendanaan dalam program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta melaksanakan kegiatan Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi (sosialisasi e-office, e-budgeting, e-harga dan pengembangan Command Center). Dengan komitmen reformasi birokrasi ditingkat daerah akan terwujud pengembangan birokrasi yang modern bersih, berintegritas, professional dan berkinerja tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

#### 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang tahun 2026.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi dan ada 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Sasaran KESATU adalah : Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi dengan indikator sasaran:

- 1) Jumlah Aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh OPD

Sasaran KEDUA adalah : Pemeliharaan dan pengelolaan Website dengan indikator sasaran :

- 1) Jumlah kunjungan Website

#### 4.2. Program dan Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan Sumberdaya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang sebagaimana pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1.**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN SERANG**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2026	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>8.208.630.624</b>	
2	16	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>8.208.630.624</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.01		<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>38.206.800</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.406.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	16	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>5.496.475.500</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.496.475.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>266.765.952</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266.765.952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>609.478.668</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.021.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.008.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.004.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetakan	Tersedianya Barang dan Penggandaan Cetakan	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.058.168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.031.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	416.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>0</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	0 Unit	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>1.428.834.704</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168.515.712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	527.784.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Laporan	12 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	732.534.992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>368.869.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	11 Unit	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	72 Unit	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113.463.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1 Unit	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.686.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>TOTAL 1</b>										<b>8.208.630.624</b>	

2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>3.550.000.000</b>	
2	16	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>3.550.000.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	16	2	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>3.550.000.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	16	2	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	0 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	16	2	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	300 komunitas	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	16	2	2.01	16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	16	2	2.0	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	18 Permohonan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	2	2.01	18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	%	0	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	2	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1 Rekomendasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	2	2.01	20	Diseminasi Informasi	Presentase khalayak yang terpapar informasi publik	%	0	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daaerah yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	4 Media	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.901.716.316	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	2	2.01	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Dokumen	2 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	795.160.332	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	16	2	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	6 Konten	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	584.013.352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	16	2	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	0 Orang	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
<b>TOTAL 2</b>										<b>3.550.000.000</b>		
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>2</b>	<b>16</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>2.550.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>2.550.000.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	90%				
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>3.500.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	16	3	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>2.546.500.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di pusat data nasional	Aplikasi	0 Aplikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.623.152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2.02	25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintahan dan/ atau portal data nasional	Layanan	1 Layanan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.070.444	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2.02	26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen gfasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo	Dokumen	0 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	16	3	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	2 Aplikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425.806.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2.02	33	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	0 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2.02	34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	0 Aplikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2.02	35	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	0 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2.02	36	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	16	3	2.02	37	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	0 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2.02	38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>TOTAL 3</b>										<b>2.550.000.000</b>	
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>2</b>	<b>20</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>54.875.500</b>
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral Di lingkup Daerah	%	70%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>54.875.500</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>54.875.500</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20	2	2.01	17	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	95%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	761.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	20	2	2.01	18	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	5%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.003.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20	2	2.01	19	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	0%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20	2	2.01	20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	29 Orang	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.111.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>322.176.604</b>
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	68%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>322.176.604</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>322.176.604</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	21	2	2.01	5	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119.091.904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	21	2	2.01	6	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.751.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	21	2	2.01	7	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.773.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	21	2	2.01	8	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>0</b>	
2	21	2	2.02	2	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan	0 Kegiatan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>TOTAL 4</b>									<b>377.052.104</b>		
<b>TOTAL 1+2+3+4</b>									<b>14.685.682.728</b>		

Tabel 4.1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentuan arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik bidang komunikasi dan informasi Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 yang telah disusun ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian untuk dilaksanakan.

Serang, 22 September 2025  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
dan Persandian Kab. Serang



Dr. H. Haerofiatra, S.Kom., M.Si  
NIP. 19800620 200604 1 016